

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PEMBANGUNAN DI DESA  
SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR).**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**MUHAMMAD IKHSAN**  
**137310610**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kehadiran Allah SWT. Atas nikmat Iman, Islam, kesejahteraan, kesehatan, kesabaran dan kemudahan. Sholawat serta salam hendaknya selalu tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsin ini dengan judul **“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).”**

Penulisan Skripsin ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penulisan Skripsin ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak lain secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas ilmu sosial dan politik.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Kepada Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu pengetahuannya yang

paling berarti kepada penulis, sehingga penulisan Skripsin ini dapat terselesaikan.

5. Kepada seluruh staf dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang, Moril, Materil, Dukungan dan motivasi kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsin ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Dengan demikian kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan ini, semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Pekanbaru, Desember 2020

Muhammad Ikhsan

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	7
1. Konsep Pemerintahan .....	7
2. Konsep Manajemen Pemerintahan .....	10
3. Konsep Kepemimpinan .....	12
4. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	19
5. Penelitian Terdahulu .....	23
B. Kerangka Pikiran .....	24
C. Hipotesis .....	26
D. Konsep Operasional.....	26
E. Operasional Variabel .....	27
F. Teknik Pengukuran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	32

B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Informan Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisa Data .....	35
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	35
 <b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis Desa Simpang Kubu .....	38
B. Keadaan dan Jumlah Penduduk .....	40
C. Agama .....	41
D. Perekonomian .....	42
E. Pendidikan .....	43
F. Kesehatan .....	45
G. Struktur Organisasi Pemerintahan .....	46
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	55
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
2.2 Operasional Variabel Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) .....	27
3.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).....	33
3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Penelitian Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).....	26



## LEMBARAN PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsin yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ikhsan  
NPM : 137310610  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul UP : Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsin ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsin ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2020  
Pernyataan

Muhammad Ikhsan



**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT (STUDI PEMBANGUNAN DI DESA  
SIMPANG KUBU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)**

**ABSTRAK**

**MUHAMMAD IKHSAN**

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi, Pembangunan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Simpang Kubu Diambil dari populasi dengan menggunakan teknik sensus dengan pertimbangan selain jumlahnya sedikit juga mereka berada pada tempat yang sama sehingga mereka dapat dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) adalah Cukup Baik bahwa yang menyatakan menyatakan kategori “ Baik” berjumlah 33 dan rata-rata responden 19 orang atau 42%. sedangkan yang menyatakan kategori “ Cukup Baik ” berjumlah 44 dan rata-rata responden 22 orang atau 49% kemudian yang menyatakan untuk kategori “ Kurang Baik ” berjumlah 13 dan rata-rata responden 7 orang atau 14%. Terbukti peran seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya sangat penting dalam hal apapun terutama dibidang pembangunan. Pembangunan desa akan maju dan berkembang apabila adanya seorang pemimpin yang cerdas dan mempunyai wawasan yang luas, sehingga mampu mengeluarkan kebijakan yang baik. Hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat harus terjaga. Sehingga akan terjadi hubungan kerja sama yang baik dalam memajukan Pembangunan Desa.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mencerdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan negara republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota serta yang terendah adalah Desa, yang mana semua daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonomi dan diakui oleh pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa daerah adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari sistim penyelenggaraan pemerintah. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun

2014, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Kepemimpinan merupakan fenomena universal yang terdapat dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang diwujudkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kehidupan dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Hal itu berarti tiap kelompok masyarakat yang melakukan kerjasama secara organisasional untuk mencapai tujuan itu, terdapat seseorang yang menjalankan kepemimpinan yang disebut pemimpin, bersifat formal atau yang disebut pemimpin formal, ataupun bersifat informal yang disebut informal. Pemimpin formal di desa adalah kepala desa, sedangkan pemimpin informal bisa sebagai ketua adat, kepa suku, kyai, ulama ataupun tokoh masyarakat yang diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, faktor kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dan amat menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di desa. Kepemimpinan kepala desa mempunyai peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa.

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban, mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenraman dan ketertiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membutuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat desa sebagai sendi utama terlaksananya pembangunan desa. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintahan desa, kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu.

Disamping pentingnya peranan pemimpin, pihak yang dipimpin atau pengikut juga mesti berperan aktif, pemimpin yang dipimpin merupakan pihak yang bekerja sama, yang mesti berkolaborasi atau ibarat dua sisi dari satu mata uang. Bagaimanapun intensitas dana dan kuatnya dorongan pemimpin, jika pengikutnya statis, maka kepemimpinan bisa menjadi tidak efektif. Ada pengaruh timbal balik antara pemimpin dan pengikut, juga interaksi pemimpin dengan pengikut, selain interaksi pemimpin dengan pengikut, juga dipengaruhi oleh elemen lingkungan dan situasional dimana kepemimpinan berlangsung, terutama perangkat nilai budaya yang menjiwai kehidupan organisasi dan masyarakat dalam segala kegiatannya.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali mempunyai pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan

pemerintah. Sehingga ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap sebagai tidak partisipasi. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai obyek pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat itu merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Memasuki era kebebasan sekarang ini, pandangan yang melihat masyarakat sebagai objek sudah tidak relevan lagi. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek yang berkemampuan untuk menciptakan dan melaksanakan kebutuhan sendiri, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pandangan ini menempatkan masyarakat pada posisi kekuatan penyeimbang yang berhadapan dengan pemerintah beserta aparatnya. Agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dikembalikan pada masyarakat, dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dan keleluasaan diberlakukannya hukum adat yang ada padanya.

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang ingin diakui keberadaannya dan ingin dihargai kemampuannya. Dari kenyataan itu, tugas seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana pemimpin tersebut dapat mengajak dan mendorong warganya untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Partisipasi anggota masyarakat ini bisa dilihat dari keterlibatan secara

fisik, mental, ataupun emosional dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

Selanjutnya kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di desa, hal ini dapat dilihat dari tugas-tugas yang diembannya sebagai Kepala Desa yaitu sebagai berikut ini :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
2. Pembangunan
3. Bidang kemasyarakatan

Kepala Desa bersama-sama dengan masyarakat berwenang mengatur dan mengukur kepentingan masyarakat sesuai dengan kesatuan hak masyarakat itu sendiri. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut, Kepala Desa dapat menggerakkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Kepala Desa harus mampu memposisikan dirinya, dan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu atau alasan-alasan lainnya. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh seorang Kepala Desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Desa Simpang Kubu merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Keadaan yang terjadi di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada saat ini dimana peran Kepala Desa

dalam bidang pembangunan kurang terwujud secara baik, kurangnya pengkoordinasian Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa bentuk pembangunan yang dilaksanakan di desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dari hasil swadaya masyarakat, kas desa, dan bantuan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Daftar Bangunan Fisik di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**

NO	Tahun	Jenis Proyek	Sumber Dana	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	2016	Semenisasi Jalan	Pemda Kampar Dana Blogren	350 m	-
2	2016	Bocover {1 Unit (7 m)}	Pemda Kampar Dana Blogren	1 Unit	-
3	2016	Semenisasi Jalan	Pemda Kampar Dana Blogren	100 m	-
4	2017	Aspal Lapen	Pemda Kampar Dana Blogren	1 Km	-
5	2017	Pengebesan/ Penimbunan	Pemda Kampar ADD	800 m	200 m
6	2018	Rehab Mesjid	Pemda Kampar ADD	-	Semua
7	2018	Pengebesan/ Penimbunan	Pemda Kampar ADD	5 Km	-
8	2018	Rehab Balai Desa	Pemda Kampar	Semua	-

NO	Tahun	Jenis Proyek	Sumber Dana	Terealisasi	Tidak Terealisasi
			ADD		
9	2019	Bocover (Jembatan Cor)	Pemda Kampar ADD	3 Unit	1 Unit
10	2019	Aspal Lapen	Pemda Kampar ADD	1,5 Km	-
11	2019	Semenisasi Jalan	Dana PMPM	518 m	-
12	2019	Semenisasi	Dana PMPM	524 m	-
13	2019	MCK	Dana PMPM	2 Unit	-
14	2019	Dernase/ Parit	Dana PMPM	103 m	-

**Sumber : Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020**

Kepala desa sebagai integrator kurang dapat membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog mengenai persoalan pembangunan desa. Kurangnya hubungan Kepala Desa secara persuasif dengan seluruh masyarakat di desa. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya proses komunikasi antara kepala desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Simpang kubu, yang bisa terlihat dari beberapa fenomena, yaitu:

1. Kepala Desa Kurang pendekatan terhadap masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan.
2. Masyarakat masih enggan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, karena kurangnya pengaruh kebijakan dari Kepala Desa.
3. Kurangnya masyarakat desa dalam menghadiri musyawarah desa untuk membicarakan persoalan mengenai pembangunan desa.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan yang telah ada.



Dari gambaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

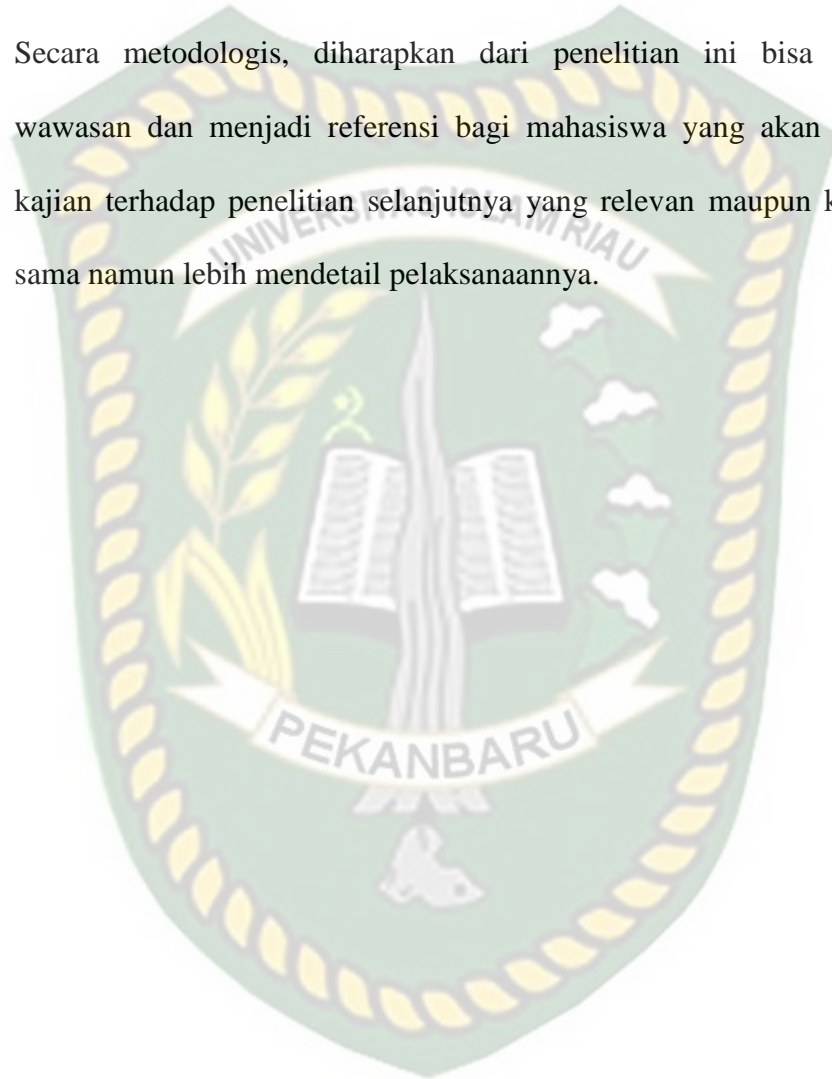
### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau. Selain itu, dengan penelitian ini penulis mampu menganalisis tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa Kubu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- c. Secara metodologis, diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan maupun kajian yang sama namun lebih mendetail pelaksanaannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005; 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga subklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafiie (2005; 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan satu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa "pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum". Dan beberapa pengertian dan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai, dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid

dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

- a. Menjamin keamanan Negara.
- b. Memelihara ketertiban.
- c. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah.

Mengenai hal ini ada beberapa definisi tentang makna atau pengertian dan pemerintah. Menurut Finer dalam Labolo (2013; 15-17), ada empat pengertian pokok pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-

jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.

- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya 'hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam

arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).

2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

## **2. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien (Salam, 2007;12).

Menurut Frederick W. Taylor (dalam Syafiie, 2013;125) ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan di kerjakan dan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik atau termudah.

Sedangkan George Terry (dalam Syafiie, 2013;126) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Selanjutnya Salam (2007;150) mengemukakan bahwa manajemen Pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari aparatur pemerintah pusat, aparatur pemerintah daerah, dan beberapa badan usaha milik Negara dan daerah. Salah satu aparatur pemerintah pusat yaitu Kepresidenan beserta aparatur utamanya yang meliputi :

1. Presiden sebagai Kepala Negara merangkap Kepala Pemerintahan (eksekutif);
2. Wakil Presiden;
3. Menteri-menteri negara atau kepala lembaga nondepartemen;
4. Kejaksaan Agung;
5. Sekretariat Negara;
6. Komisi-komisi (seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial).

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah. Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Pemerintahan Daerah provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah provinsi dan DPRD provinsi.



- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

## 2. Konsep Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Nurcholis (2011;1) Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Dalam konteks Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Dengan gambaran tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa perangkat pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam terlaksananya pemerintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi

masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan khususnya.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepala BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Warga Negara Republik Indonesia. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Jabatan kepala desa adalah enam (6) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan lain yang oleh pertauran perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
  - a. Hasil usaha desa;
  - b. Hasil kekayaan desa;
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. Hasil gotong royong;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota (desentralisasi).

4. Bantuan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga harus diikutsertakan pemerintah desa dan BPD. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan Bupati/Walikota. Dengan demikian, pada dasarnya kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, wewenangnya tidak boleh disalahgunakan.

Sebagai perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa.

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

### **3. Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan secara etimologi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “Mimpin” dengan menambah awalan “Pe” menjadi “Pemimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Seorang pemimpin seharusnya membimbing bawahannya untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan secara empiris merupakan proses yang berisi rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi, berkesinambungan, dan terarah pada suatu tujuan. Rangkaian-rangkain itu berwujud kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan, memimpin serta terarah pada tujuan yang telah di sepakati bersama. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi antar pribadi atau kelompok, dalam situasi tertentu dan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin merupakan pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan.

### a. Pengertian Kepemimpinan

Dalam suatu instansi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi, dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu instansi akan baik, jika tipe, cara, atau gaya kepemimpinan dan peranan dari pemimpin di terapkan dengan baik.

Tegas baik atau buruknya tercapai atau tidaknya suatu instansi sebagian besar ditentukan oleh kecakapan pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengarahkan para bawahannya, karena kecakapan dan kewibawaan seorang pemimpin melaksanakan kepemimpinannya akan mendorong gairah kerja, kreatifitas, partisipasi, dan loyalitas para bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Adapun definisi kepemimpinan yang dikemukakan beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Veitzhal Rivai (2012:53) menyatakan bahwa:

“Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Robbins dan Coulter (2012:488) menyampaikan bahwa:

*“leadership is what leaders do. It’s proces of leading a group and influencing that group to achiev it’s goals”* “Kepemimpinan adalah apa yang pemimpin lakukan. Itu adalah proses memimpin kelompok dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan”

Kepemimpinan menurut Amirullah (2015:167) adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Definisi- definisi diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dan merubah perilaku untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah organisasi atau kelompok.

#### **b. Teori Kepemimpinan Teori Kepemimpinan**

Teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai, Deddy Mulyadi (2012:7) mengemukakan bahwa teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori mengenai kepemimpinan dapat digolongkan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu:

##### 1) Pendekatan sifat

Pendekatan ini menekankan pada kualitas pribadi dari para pemimpin. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugrahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain seperti energi yang tidak berkurang, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan.

Empat sifat umum yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi antara lain (Thoha, 2012):

a. Kecerdasan

Hasil penelitian umumnya membuktikan bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari penelitian tersebut adalah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.

b. Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial

Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. Dia mempunyai keinginan menghargai dan dihargai.

c. Motivasi Diri dan Dorongan Berpartisipasi

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari ekstrinsik

d. Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan

Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.

2) Pendekatan Kepribadian perilaku

Telaah kepemimpinan yang dilakukan pada pusat riset Universitas Michigan, dengan sasaran melokasikan karakteristik perilaku kepemimpinan yang tampaknya dikaitkan dengan ukuran keefektifan kinerja, mengidentifikasi terdapat dua gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu:

a) Pemimpin yang berorientasi pada tugas menerapkan pengawasan ketat



sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan.

- b) Pemimpin yang berorientasi pada bawahan mendelegasikan pengambilan keputusan bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Pemimpin yang berpusat pada pegawai memiliki perhatian terhadap kemajuan, pertumbuhan dan prestasi pribadi pengikutnya. Tindakan-tindakan ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan dan perkembangan kelompok.

### 3) Pendekatan kepemimpinan situasional

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.

### c. Fungsi dan Peran Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau instansi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan diluar situasi itu. Secara operasional ada lima fungsi pokok kepemimpinan yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai (2012:34), yaitu:

#### 1) Fungsi instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana

perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

## 2) Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk memperoleh berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

## 3) Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain serta

keikutsertaan pemimpin.

4) Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

5) Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Dalam menjalankan perannya pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan dengan baik dalam kerja sama yang optimal. Berikut ini peran pemimpin yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2014:219) diantaranya :

2) Peran Interpersonal

Peran interpersonal terbagi kedalam 3 peran yaitu :

- a) Peran yang menampakan diri dengan berinteraksi kepada bawahan juga didalam dan diluar organisasi sebagai symbol keberadaan organisasi.

- b) Peran selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahan.
  - c) Peran selaku penghubung dimana seorang manajer harus mampu memberikan perhatian khusus kepada pegawainya.
- 3) Peran Informasional

Peran informasional terbagi ke dalam 3 peran yaitu :

- a) Seorang manajer adalah pemantau arus informasi yang terjadi dari luar dan dalam organisasi.
  - b) Sebagai pemimbing informasi,
  - c) Peran selaku juru bicara organisasi.
- 4) Peran Pengambil Keputusan

Peran pengambil keputusan terbagi ke dalam 3 peran yaitu :

- a) Sebagai entrepreneur diharapkan mampu mengkaji terus menerus berbagai peluang dari situasi yang dihadapi oleh organisasi.
- b) Sebagai peredam gangguan dengan kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi mengalami gangguan.
- c) Sebagai pembagi sumber daya manusia dengan wewenangnya untuk menempatkan orang pada posisi tertentu, mempromosikan karyawan yang berprestasi.

#### **d. Tipe Kepemimpinan**

Kepemimpinan didalam melaksanakan fungsi-fungsinya, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila akitivitas dapat di capai dan sesuai

dengan rencana maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polannya masing-masing. Vitzhal Rivai (2012:42) mengemukakan gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu:

- 1) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas
- 2) Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama
- 3) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai

Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut terbentuk perilaku kepemimpinan yang terdiri dari tiga pokok kepemimpinan, yaitu:

- 1) Tipe kepemimpinan otoriter

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah

- 2) Tipe kepemimpinan kendali bebas

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

- 3) Tipe kepemimpinan demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya. Kemauan, kehendak, kemampuan, buahpikiran, pendapat, kreatifitas, inisiatif yang berbeda-beda dan diharga disalurkan secara wajar. Tipe kepemimpinan ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing- masing.

**e. Dimensi dan Indikator Kepemimpinan**

Veitzhal Rivai (2012:53) mengemukakan bahwa seorang pemimpin dalam mengimplementasikan kepemimpinannya harus mampu secara dewasa melaksanakan kedewasaan terhadap instansi atau organisasinya, kepemimpinan dibagi ke dalam lima dimensi dan sembilan indikator, yaitu:

- 1) Kemampuan untuk membina kerjasama dan hubungan yang baik
  - a) Membina kerjasama dan hubungan baik dengan bawahan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing
  - b) Kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya
- 2) Kemampuan yang efektifitas
  - a) Mampu menyelesaikan tugas di luar kemampuan
  - b) menyelesaikan tugas tepat waktu
  - c) Hadir tepat waktu dan tidak terlambat

- 3) Kepemimpinan yang partisipatif
  - a) Pengambilan keputusan secara musyawarah
  - b) Dapat menyelesaikan masalah secara tepat
  - c) Mampu meneliti masalah yang terjadi pada pekerjaan
- 4) Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau waktu
  - a) Bersedia untuk membawa kepentingan pribadi dan organisasi kepada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan organisasi menggunakan waktu sisa untuk keperluan pribadi
  - b) Mampu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target
- 5) Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang
  - a) Tanggung jawab seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas mana yang harus ditangani sendiri dan mana yang harus ditangani secara kelompok.
  - b) Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pengambilan keputusan

#### **4. Konsep Partisipasi Masyarakat**

##### **a. Pengertian Partisipasi**

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang artinya mengambil bagian / keikutsertaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:831) "partisipasi" berarti; hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan; peran serta. Pengertian sederhana tentang partisipasi dalam hubungannya dengan pembangunan adalah mengambil bagian atau ikut berperan secara aktif dalam semua proses pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan.

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk

Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam bangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut.

- a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek- proyek pembangunan.
- c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,



kehidupan, dan lingkungan mereka.”

Sedangkan menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith (dalam Nasution, 2009:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Dari pendapat tersebut, diketahui unsur partisipasi adalah a) harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai; b) adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan bersama; c) keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik, dan; d) harus adanya tanggung jawab bersamademi tercapainya tujuan kelompok.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49) . Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut olehkarena itu;

- a) Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
- b) Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- c) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d) Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- e) Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi melibatkan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisik seseorang. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi didorong dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama, berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

### **5. Konsep Pembangunan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk di dalamnya pembangunan Desa. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Melalui implementasi Undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi juga lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran Undang-undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan Nasional. Undang-undang Desa ini juga merupakan momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat Undang-undang Desa yang bersifat mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa, pengelolaan asset dan keuangan Desa, pembangunan kawasan Desa, kewenangan

Desa dan perangkat Desa. Undang-undang ini dalam pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dengan Undang-undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan Desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-undang Desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi Kepala Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa tujuan pemerintahan Desa dalam Undang-undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni : Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang pengelolaan keuangan dan asset Desa. Pertama, pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintahan Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam Undang-undang ini juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak/retribusi

daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). Kedua, pada pasal 76 dan 77, Desa diberi kewenangan untuk mengelola aset yang berada diwilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis, pengelolaan keuangan dan aset Desa akan dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan saat ini.

Pengelolaan keuangan dan aset Desa dalam Undang-undang ini tentunya merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Artinya, pemerintahan Desa perlu mempersiapkan diri dan memodernisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan perangkat Desa, maka dalam pasal 112 sampai pasal 115 baik pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pendidikan dan penyuluhan serta memberikan pedoman penyusun peraturan dan perencanaan Desa secara partisipatif. Selain itu juga, evaluasi peraturan Desa dilakukan untuk menjamin kualitas peraturan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-undang Desa merupakan bagian yang terpisahkan dari program pro-rakyat yang selama ini telah dijalankan. Perluasan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat masyarakat Desa diharapkan dapat segera terwujud dari pelaksanaan Undang-undang ini. Memperluas kesejahteraan di tingkat masyarakat Desa secara tidak langsung mempercepat distribusi pembangunan serta mendorong pengentasan kemiskinan secara Nasional. Pelaksanaan Undang-undang Desa tentunya akan membantu percepatan

pembangunan Desa, mendorong sejumlah potensi ekonomi Desa, serta memperkuat sistem ketahanan ekonomi Desa.

Arah pembangunan Nasional ke depan dipastikan akan lebih merata dan berkeadilan, pemerintahan Desa, pembinaan serta pengawasannya. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di pedesaan akan membantu menyelesaikan sejumlah tantangan Nasional seperti pengetasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan serta secara agregat lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu pembangunan Desa mau tidak mau harus dilaksanakan dalam rangka pengetasan kemiskinan masyarakat.

Menurut Siagian (dalam Bratakusumah 2003;4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat Desa adalah meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.

Pembangunan desa ditunjukkan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi

harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (Keppres No.21/1989 : 26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa dapat dikemukakan :

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
- b. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non tanggung jawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukungnya.
- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan Nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan Nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya diarahkan kepedesaan.

- e. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa. Dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa, beban dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembangunan desa dapat dilihat sebagai proses dan metode. Dikatakan sebagai proses karena memperlihatkan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara yang tradisional kearah yang lebih maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik yang menyangkut aspek sosial maupun aspek psikologisnya, dan sebagai metoda berarti bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar masyarakat berkemampuan dan sumber-sumber yang mereka miliki.

Untuk mengadakan perubahan sosial budaya masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban seluruh aparat pemerintah dan masyarakat sendiri untuk menciptakan dan memperluas serta melaksanakan program-program



pembangunan Nasional yang diselenggarakan termasuk penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dan kelurahan. Dengan demikian maka harus mutlak melaksanakan administrasi pemerintahan dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat menaikkan hasil produksinya.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan Nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme "bottom-up planning", dimulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Musrenbang Kabupaten/ Kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil

Musrenbang Kabupaten / Kota juga digunakan untuk Musrenbang Provinsi, Rakorpus (Rapat Koordinasi Pusat) dan Musrenbang Nasional.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa dilanjutkan di tingkat Kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/ kegiatan ditingkat Kabupaten / Kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat Desa, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBDesa, serta menetapkan wakil/ delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

## 6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Apritari (2017)	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyumas	Sama-sama mengkaji tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terletak pada lokasi yang berbeda
2	Dhani Akbar (2017)	Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa	Sama-sama mengkaji tentang pengaruh	Bedanya terletak pada metode dan lokasi

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun	kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	penelitian
3	Rambu Hamu Eti (2018)	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Sama-sama mengkaji tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Bedanya terletak pada metode dan lokasi penelitian

Sumber : Data Olahan, 2020

## B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa.

Menurut Veitzhal Rivai (2012:53) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Keith Devis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain :

1. Kecerdasan
2. Kedewasaan dan Keluasan hubungan sosial
3. Motivasi diri dan Dorongan berprestasi

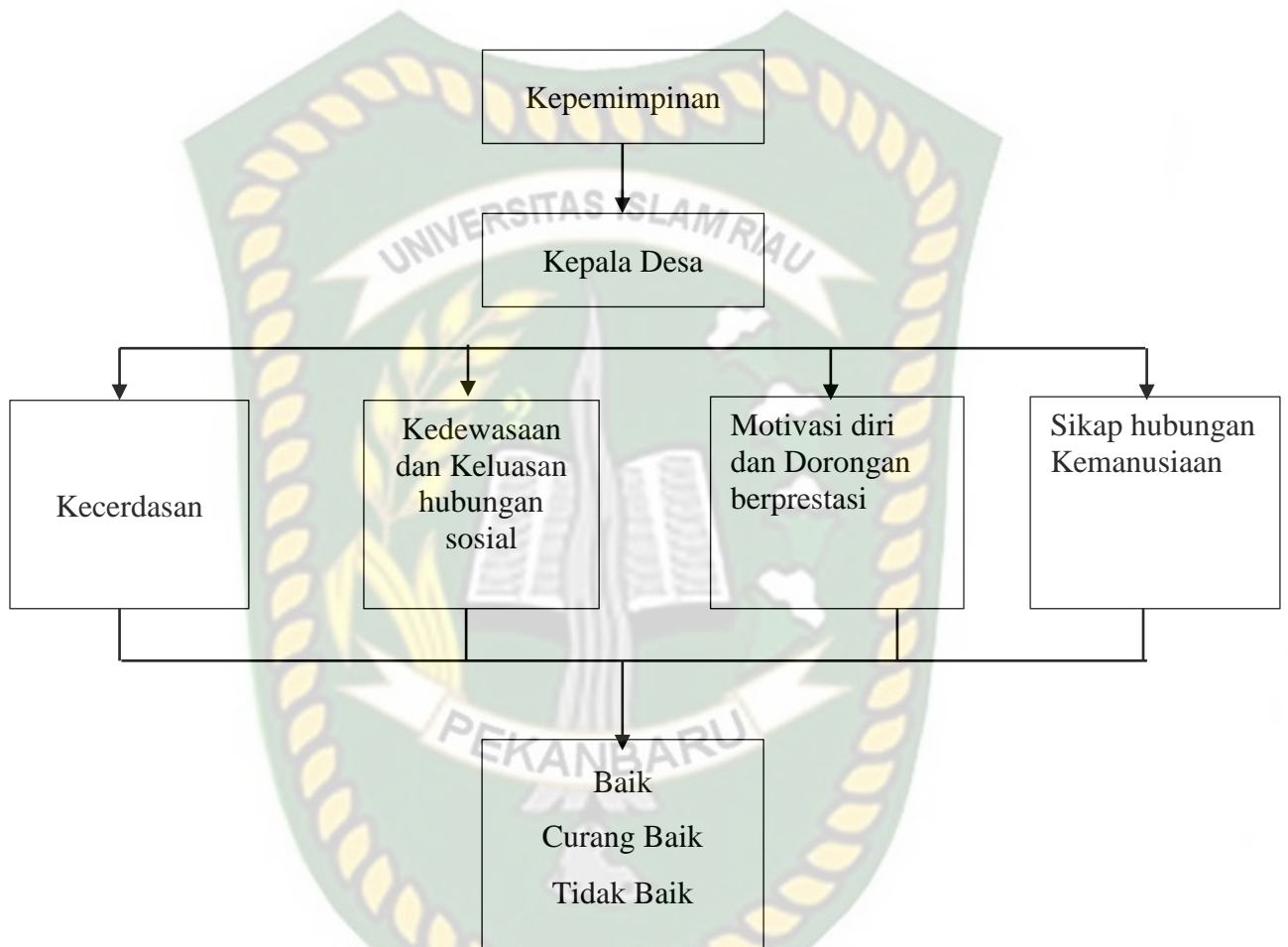
#### 4. Sikap hubungan Kemanusiaan

Menurut Mardikanto dkk (2013:81) partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan, selanjutnya Yadav dalam Mardikanto dkk (2013:82) mengemukakan ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang. Berdasarkan uraian diatas maka berikut adalah bagan kerangka konsep penelitian:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).**



Sumber : Teori Veitzhal Rivai (2012:53) di modifikasi penulis

### C. Konsep Operasional

Konsep adalah unsur penelitian yang sangat penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena alam. Konsep merupakan generalisasi dari kelompok fenomena

tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan balasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka dalam hal ini penulis mengemukakan definisi dari konsep yang akan dipergunakan :

1. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan
3. Kecerdasan merupakan tingkat kemampuan kepala desa di atas rata-rata masyarakat.
4. Kedewasaan dan Keluasan hubungan sosial merupakan kepala desa melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta mempunyai emosi yang matang dan stabil.
5. Motivasi diri dan Dorongan berprestasi kepala desa memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien.
6. Sikap hubungan Kemanusiaan merupakan pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel 2.2 Operasional Variabel Mengenai Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Veitzhal Rivai (2012:53)	Kepemimpinan	Kecerdasan	a. Tingkat kecerdasan Kepala Desa diatas rata-rata. b. Tingkat kecerdasan Kepala Desa lebih tinggi di bandingkan dengan masyarakat Desa	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		Kedewasaan dan Keluasan hubungan sosial	a. Kepala Desa mempunyai emosi yang matang dan stabil. b. Kepala Desa dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		Motivasi diri dan Dorongan berprestasi	a. Kepala Desa memiliki motivasi diri yang tinggi b. Kepala Desa selalu memberikan dorongan berprestasi kepada masyarakat.	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		Sikap hubungan Kemanusiaan	a. Kepala Desa Sungai Paku selalu menolong masyarakat yang sedang kesusahan.	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
			b. Terjalin hubungan yang baik antara Kepala Desa Sungai Paku dengan masyarakat.	

Sumber : Data Olahan,2020

### E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Baik, Kurang Baik, Tidak Baik dikatakan :

Baik : Apabila semua indikator pada katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing- masing indikator variabel adalah sebagai berikut :

#### a. Kecerdasan, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 33%.



b. Kedewasaan dan Keluasan hubungan sosial, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 33%.

c. Motivasi diri dan Dorongan berprestasi, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 33%.

d. Sikap hubungan Kemanusiaan, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 33%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Pelalawan.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90).Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif

atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Pengurus Desa, dan Masyarakat.

**Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa Simpang Kubu	1	1	100%
2	Pengurus Desa	5	5	100%
3	Masyarakat	1905	40	2,09%
	<b>Jumlah</b>	<b>1911</b>	<b>46</b>	<b>2,4 %</b>

Sumber : Hasil Modifikasi Tahun 2020

Penelitian yang membahas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Memiliki Sampel yaitu Kepala Desa

yang berjumlah 1 Orang, Pengurus Desa berjumlah 5 orang dan Masyarakat berjumlah sebanyak 40 Orang yang di jadikan sampel dalam penetian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan penelitian dan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pengaruh Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan dan ini berupa tanggapan responden hasil wawancara serta menyebarkan kuesioner.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung, buku-buku bacaan, tokoh masyarakat, dan Undang-undang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data di atas dikumpul dengan cara :

1. Teknik Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti berupa wawancara bebas dan terpimpin terhadap narasumber. Dalam pelaksanaannya, penulis membawa pedoman wawancara yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan masalah penelitian. Dengan wawancara tersebut diharapkan menghasilkan jawaban mendalam tentunya menambahkan hal-hal yang belum terlukiskan dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan data dan dituangkan kedalam

pembahasan hasil penelitian.

## 2. Kuesioner

Menyebarkan Kuesioner kepada responden dimana setiap pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya secara tertulis.

## 3. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dan segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian

## F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

## G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).**

NO	JENIS KEGIATAN	Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

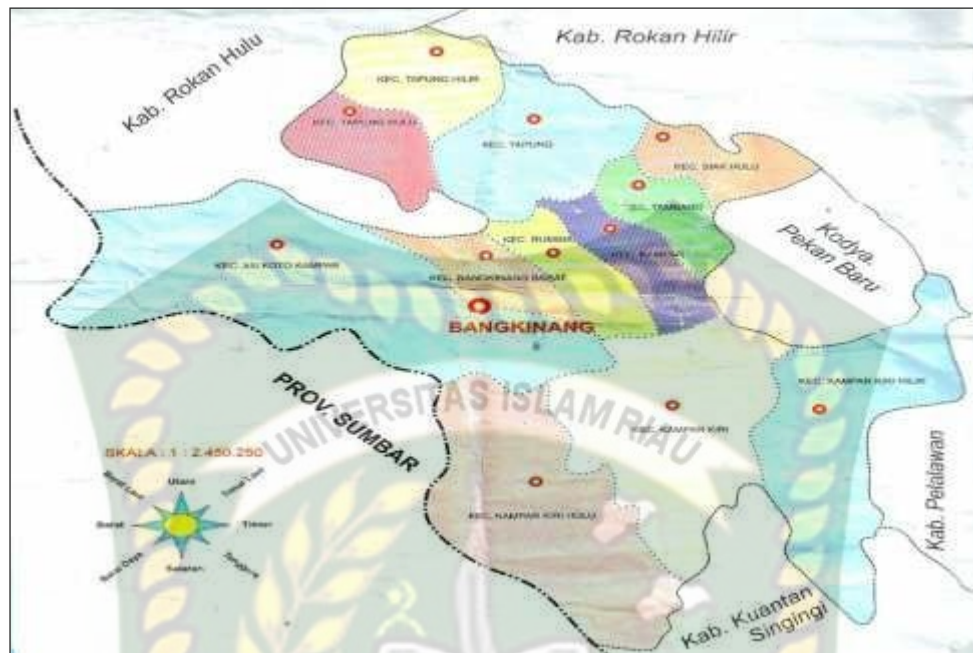
*Sumber : Olah Data Penelitian, 2020*

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Desa Simpang Kubu

Desa Simpang Kubu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar. Letaknya dipinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Terletak sesudah desa Air Tiris dan sebelum desa Batu Belah kalau kita dari Pekanbaru. Dinamakan dengan desa Simpang Kubu dikarenakan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia umumnya di Riau khususnya di Kabupaten Kampar terjadi peperangan antara pihak Belanda dan rakyat Kampar. Maka dari itu rakyat Kampar membuat sebuah benteng dan tanda kekuasaan pos di sebuah wilayah untuk perlindungan dan tanda kekuasaan. Pada peperangan tersebut gugurlah Panglima Khatib dan dimakamkan di wilayah tersebut. Karena sebuah makam dan tugu pahlawan yang terletak di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut dinamakan Simpang Kubu. Dalam bahasa ocu kamparnya makam adalah kubu, oleh sebab itu dinamakan desa Simpang Kubu. Lokasi makam pahlawan itu terletak dipinggir jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Makam pahlawan tersebut adalah makam Datuk Panglima Khatib. Kita dapat melihat makam tersebut apabila kita melewati jalan raya Pekanbaru Bangkinang. Dahulu sebelum adanya desa Simpang Kubu nama daerah tersebut adalah Kecamatan Lima Koto. Karena daerahnya yang luas dan pengurusan daerahnya yang sulit, maka terjadilah pemekaran, yakni desa Ranah, desa Air Tiris, desa Simpang Kubu, desa Tanjung Rambutan dan desa Batu Belah. (Dokumentasi Kantor Desa Simpang Kubu)



Desa Simpang Kubu dipimpin oleh kepala desa dan dalam kepengurusan desa dibantu oleh perangkat atau aparat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Kemudian dibentuk pula perangkat desa seperti kepala dusun, RW, RT, perangkat kepemudaan dan perangkat desa lainnya. Karena desa simpang kubu ini masih tergolong luas daerahnya, maka wilayahnya pun terbagi menjadi 3 dusun, yakni : dusun 1 panglima Khatib, dusun 2 metro lestari dan dusun 3 padang beringin. Setiap dusun memiliki 2 perangkat RW dan 4 perangkat RT. Adapun bentuk dan jumlah perangkat desa simpang kubu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kaur Pemerintahan : 1 Orang
4. Kaur Umum : 1 Orang
5. Kaur Keuangan : 1 Orang



6. Kaur Pembangunan : 1 Orang
7. Kepala Dusun : 3 Orang
8. RW : 6 Orang
9. RT : 12 Orang

Wilayah Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar mempunyai luas wilayah  $\pm$  488 Ha. Yang terdiri dari 3 Dusun. Desa Simpang Kubu mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan :

1. Utara berbatasan dengan Desa Muara Jalai
2. Selatan berbatasan dengan Desa Lipat Kain
3. Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rambutan
4. Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak

Jarak Desa Simpang Kubu dari pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Kabupaten adalah  $\pm$  7 KM.
2. Jarak dari pusat pemerintahan ibu Kota Propinsi adalah  $\pm$  58 KM.

#### **B. Keadaan dan Jumlah Penduduk**

Penduduk Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar berdasarkan pada daftar isian data profil Desa Simpang Kubu tahun 2019/ 2020 berjumlah  $\pm$  2578 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki- laki	1218	47
2.	Perempuan	1360	53
<b>Jumlah</b>		<b>2578</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020

Tabel VI.1 tersebut dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, dimana penduduk laki-laki berjumlah 1218 jiwa atau 47 % sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 1360 jiwa atau 53 %.

Di desa Simpang Kubu terdapat 3 suku, yaitu suku Domo, suku Kampai dan suku Pitopang. Yang mana dari ketiga suku ini adalah suku asli dari desa Simpang Kubu. Tapi yang paling mendominasi suku di desa ini adalah suku Domo, yaitu sebanyak 280 KK, yang terdiri dari 3 Dusun.

### C. Agama

Masyarakat di desa Simpang Kubu menjunjung tinggi dan menjalankan perintah agama. Oleh karena itu masyarakat di desa Simpang Kubu semua penduduknya memeluk agama Islam 100%, maka sarana peribadatan yang ada hanya sarana untuk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel VI.2 Jumlah Sarana Ibadah**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Musholla/surau	9
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020

Adapun organisasi keagamaan yang ada di desa Simpang Kubu sebagai wadah kegiatan sosial keagamaan adalah sebagai berikut :

- a. Taman pengajian Al-Qur'an (TPA) atau pondok pondok pengajian Al-Qur'an
- b. Panitia hari-hari besar Islam (PHBI)

Selain wadah dan organisasi keagamaan tersebut terdapat organisasi lainnya seperti organisasi remaja mesjid/ mushalla, kelompok wirid yasin pemuda dan pemudi, wirid ibu-ibu PKK, kelompok wirid lansia (lanjut usia), dan kelompok yasin RT/RW/mesjid dan mushalla (surau dan majelis taqlim).

#### D. Perekonomian

Di lihat dari segi ekonomi masyarakat, desa Simpang Kubu pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi. Tapi yang paling umum dan mendominasi mata pencaharian masyarakat desa Simpang Kubu adalah perkebunan/pertanian, jasa/buruh dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada berikut ini :

**Tabel IV.3 Mata Pencaharian**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase %
1.	Pegawai Negeri Sipil	47	2
2.	ABRI	13	1
3.	Swasta	32	1
4.	Tani/ kebun	714	31
5.	Pertukangan	428	19
6.	Pensiun	29	1
7.	Pedagang	513	22
8.	Wira Usaha	19	1
9.	Nelayan	97	4
10	Jasa	417	18
<b>Jumlah</b>		<b>2309</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020

Dari tabel IV.3 diatas ditentukan bagi masyarakat desa Simpang Kubu yang sudah bekerja saja. Dapat dilihat bahwa mata pencaharian utama masyarakat desa Simpang Kubu adalah dalam bidang pertanian/perkebunan yaitu 714 (31%). Dalam bidang pertaniann ini terutama dalam bidang karet. Dengan demikian desa Simpang Kubu dapat dikatakan sebagai desa yang agraris dengan mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian/ perkebunan.

#### **E. Pendidikan**

Pendidikan merupakan wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mengetahui tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Pendidikan di desa Simpang Kubu cukup baik. Kebanyakan masyarakat disana sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak cucu mereka. Untuk itu masyarakat di desa ini sudah banyak menyekolahkan anaknya minimal sampai ke jenjang pendidikan sekolah menengah umum (SMU/Sederajat) sampai ke perguruan tinggi. Meskipun masih ada juga masyarakat yang pendidikannya Cuma sampai pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP/Sederajat). Untuk lebih jelas mengenai gambaran ini maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.4 Jenjang Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase %
1.	Buta Huruf	109	4
2.	Belum sekolah	277	11
3.	Sekolah taman kanak-kanak	87	4
4.	Sekolah dasar	589	24

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase %
5.	SLTP/Sederajat	713	29
6.	SLTA/Sederajat	618	25
7.	Akademi (D1-D3)	34	1
8.	Sarjana (S1-S3)	51	2
<b>Jumlah</b>		<b>2478</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020

Dari tabel IV.4 diatas menunjukkan pada umumnya tingkat pendidikan yang pernah dicapai masyarakat dapat dikatakan cukup memadai. dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya dapat dikatakan cukup relatif tinggi. Secara kuantitatif tertinggi jumlah anak sekolah berada pada tingkat pendidikan SLTP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Dengan demikian program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat desa Simpang Kubu yang diprogramkan pemerintah sudah dapat dikatakan tercapai. Untuk mendukung mutu upaya peningkatan mutu pendidikan telah dibangun beberapa sarana pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel IV.5 Sarana Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak (TK)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	2
3.	Ibtidaiyah	1
4.	SLTP	1
5.	Tsanawiyah	1
6.	SMU	1
7.	Madrasah Aliyah	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020

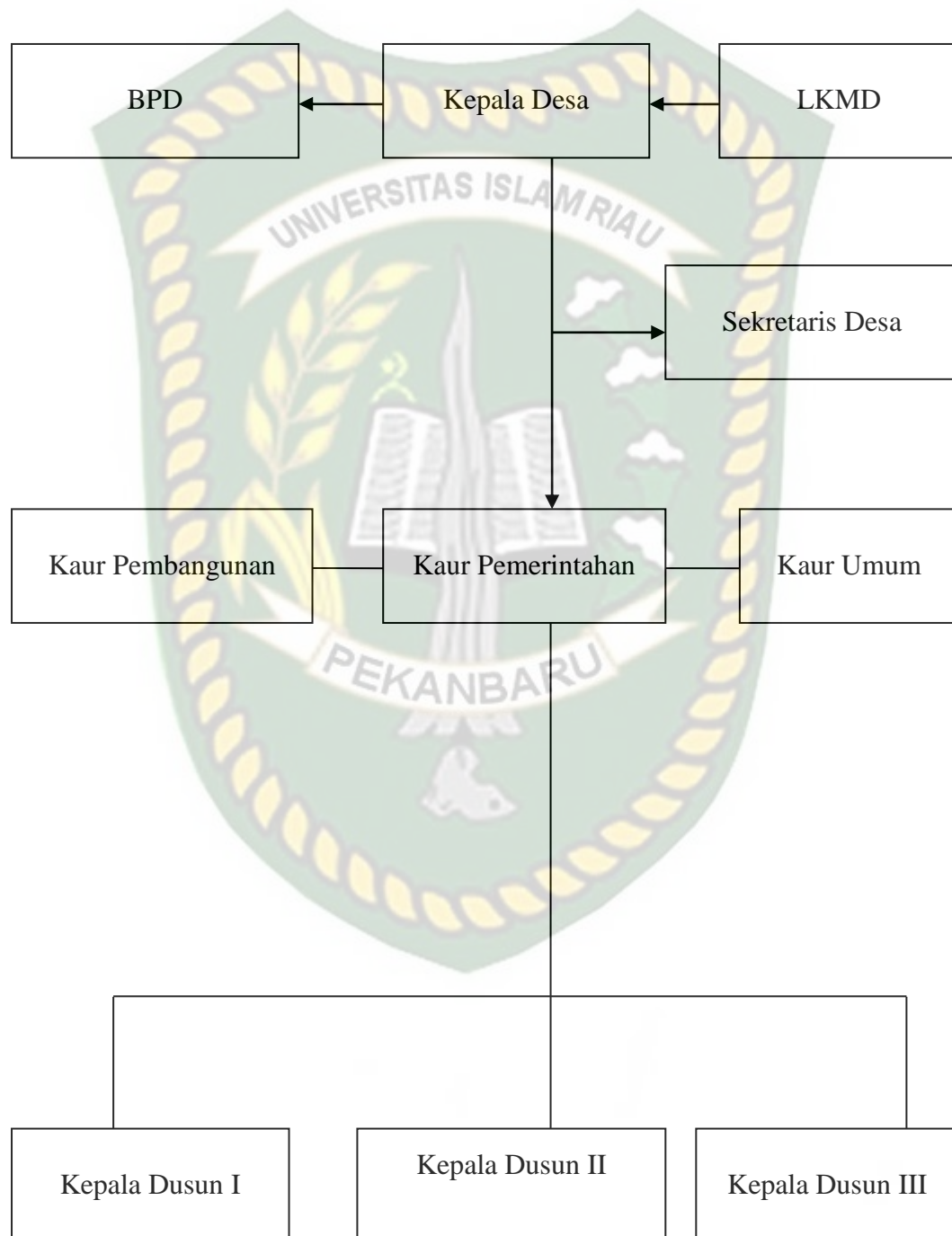
Dengan adanya sarana pendidikan ini, maka pendidikan di desa Simpang Kubu cukup memadai untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya.

#### **F. Kesehatan**

Untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Namun masih sering juga pelayanan dirasakan masyarakat masih kurang. Ini disebabkan karena tidak lengkapnya alat medis dan kurangnya tenaga medis yang handal. Akan tetapi, karena desa Simpang Kubu dekat dengan ibu kota Kabupaten Kampar, maka bagi masyarakat yang merasakan kurangnya pelayanan kesehatan di desa ini biasanya langsung datang ke rumah sakit umum di Bangkinang. (Dokumentasi Kantor Desa Simpang Kubu).

#### D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar



Sumber: Kantor Kepala Desa Simpang Kubu, 2020

## 1. Kepala Desa

a. Kepala Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- 2) Menyelenggarakan urusan pembangunan.
- 3) menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

b. Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan Peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.



- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada berfungsi memimpin dan menjalankan tugas administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

### a. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- 2) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa.
- 3) Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
- 4) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 5) Menyusun Rancangan APBDesa.
- 6) Melaksanakan administrasi keuangan.
- 7) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- 8) Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**3. Kepala Urusan Pemerintahan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:**

- 1) Kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- 2) Kegiatan administrasi pertanahan.
- 3) Pencatatan monografi Desa.
- 4) Kegiatan ketentraman dan ketertiban pertanahan sipil.
- 5) Penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa.
- 6) Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**4. Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:**

- 1) Kegiatan administrasi pembangunan Desa.
- 2) Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
- 3) Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi Desa.
- 4) Mencatat dan mempersiapkan badan usulan kegiatan pembangunan Desa.
- 5) Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

**5. Kepala Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:**

- 1) Melaksanakan tata kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar.
- 2) Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya.

- 3) Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor.
- 4) Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa.
- 6) Pencatatan inventarisasi kekayaan Desa.
- 7) Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya.
- 9) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**6. Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas dan fungsi:**

- 1) Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes.
- 2) Fungsi: Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, persiapan bahan penyusunan

**7. Kepala Urusan Kemasyarakatan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas dan fungsi:**

- a. Tugas Kaur Kemasyarakatan ialah kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- b. Fungsi Kaur Kemasyarakatan ialah penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama, penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.

### **8. Kepala Dusun**

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama Bupati yang diusulkan oleh Kepala Desa.

- a. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- b. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas di wilayah kerjanya.
- c. Fungsi Kepala Dusun adalah:
  - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa.
  - 2) Melaksanakan keputusan Desa di wilayah kerjanya.
  - 3) Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.
- d. Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam melihat kepemimpinan kepala desa yang ada di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar serta kemampuan masyarakat dalam memberikan jawaban pertanyaan berdasarkan kuisisioner yang penulis berikan, maka penulis menguraikan secara singkat tentang keadaan umur, tingkat pendidikan responden penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kriteria responden sampel yang dijadikan objek penelitian sehingga penulis dapat lebih mengenalinya.

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada lokasi penelitian terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan tidak ada. Untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.I Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	37	82 %
2.	Perempuan	8	18%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel V.I diatas dapat dijelaskan bahwa responden penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). yang paling banyak adalah laki-laki dengan jumlah 37 orang 82% dan dari total responden berjumlah 45 orang. Sedangkan perempuan sebanyak 8 orang 18% yang dijadikan responden.

## 2. Tingkat Umur Responden

Dari hasil penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) serta penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat umur yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Tingkat Umur Responden Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase %
1.	20-30 Tahun	5	11%
2.	31-40 Tahun	15	33%
3.	41-50 Tahun	25	56%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2020

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur 20 sampai 30 sebanyak 5 orang atau 11% , responden yang berumur dari

31 sampai 40 tahun berjumlah 15 orang atau 33%, responden yang berumur dari 41 sampai 50 tahun berjumlah 25 orang atau 56%. Dari uraian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian responden berumur 41-50 tahun.

### 3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden, semakin tinggi pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh penelitian dalam kuisisioner penelitian. Dari hasil penelitian tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) serta penyebaran kuisisioner, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	6	13%
2.	SMP	18	40%
3.	SLTA	12	27%
4.	D3	2	4%
5.	Strata 1	7	16%
Jumlah		45	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2020

Dari tabel V.3 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan responden paling banyak adalah tamatan SMP dengan jumlah 18 orang atau 40% dari jumlah keseluruhan responden yaitu berjumlah 45 orang, selanjutnya tamatan SLTA sebanyak 12 orang atau 27%, tamatan Strata 1 sebanyak 7 orang atau 16%, tamatan SD sebanyak 6 orang atau 13%, sedangkan responden yang sedikit merupakan responden yang tamatan D3 berjumlah 2 orang atau 4% dari jumlah keseluruhan responden yaitu berjumlah 45 orang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan responden mayoritas adalah tamatan pendidikan menengah pertama, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tamatan SMP yang berjumlah 18 orang dari total jumlah responden sebanyak 45 orang.

#### **B. Pembahasan Hasil Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Kepemimpinan Kepala Desa merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang Kepala Desa juga tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, untuk itu kepemimpinan dan juga partisipasi dari masyarakat harus berjalan secara seiring dan sejalan agar tercipta suasana yang kondusif dan harmonis sehingga tujuan dan cita-cita untuk menjadikan desa semakin baik akan bisa terwujud.

Untuk melihat hasil dan pembahasan dari analisis deskriptif tanggapan responden mengenai Kepemimpinan Kepala Desa maka telah di rangkum satu



persatu pada tabel-tabel yang akan disajikan berikut ini berdasarkan indikator kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi serta sikap hubungan kemanusiaan.

### 1. Kecerdasan

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang indikator kecerdasan pada penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Kecerdasan pada Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tingkat kecerdasan Kepala Desa Simpang Kubu diatas rata-rata.	24	18	3	45
		53%	40%	7%	100%
2	Tingkat kecerdasan Kepala Desa Simpang Kubu lebih tinggi di bandingkan dengan masyarakat Desa Sungai Paku.	26	10	9	45
		58%	22%	20%	100%
Jumlah		50	28	12	90
Rata-rata		25	14	6	45
Persentase		56%	31%	13%	100%

Sumber :Data Olahan Lapangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai kecerdasan Kepala Desa Simpang Kubu 25 orang (56%) menjawab baik, 14 orang (31%) menjawab cukup baik, 6 orang (13%) menjawab kurang baik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata masyarakat di sekitar Desa Simpang Kubu

menganggap bahwa Tingkat kecerdasan Kepala Desa simpang kubu “Cukup Baik”.

Hasil penelitian umumnya membuktikan bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari penelitian tersebut adalah pemimpin tidak bisa melampui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya

Tingkat kecerdasan Kepala Desa dapat diketahui dengan melihat bagaimana cara ia berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat Desa serta dalam mengambil suatu kebijakan bisa bersikap arif dan bijaksana. Dengan terpilihnya seseorang menjadi Kepala Desa, maka itu sudah membuktikan bahwa kecerdasan yang ia miliki lebih tinggi apabila dibandingkan dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Kubu, tanggal 23 November 2020 diperoleh informasi bahwa : *“bahwasannya kecerdasan Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Desa Sungai Paku. Karena dengan kecerdasan yang dimiliki dapat membuat seorang pemimpin berfikir dengan lebih baik dalam mengambil suatu kebijakan. Dan tentunya untuk sesuatu yang lebih baik dalam memajukan Desa Sungai Paku terutama di bidang Pembangunan.”*

## **2. Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial**

Umumnya di dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal, seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil. Hal ini membuat pemimpin tidak mudah panik dan goyah

dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang Indikator kedewasaan dan keluasan hubungan sosial Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Kedewasaan dan Keluasan hubungan Sosial pada Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kepala Desa Simpang Kubu mempunyai emosi yang matang dan stabil.	17	23	5	45
		38%	51%	11%	100%
2	Kepala Desa Simpang Kubu dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan internal maupun eksternal tidak mudah panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.	15	20	10	45
		33%	44%	22%	100%
Jumlah		32	43	15	90
Rata-rata		16	21	8	45
Persentase		36%	48%	17%	100%

Sumber :Data Olahan Lapangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator kedewasaan dan keluasan hubungan sosial Kepala Desa Simpang Kubu 16 orang (36%) menjawab baik, 21 orang (48%) menjawab cukup baik, 8 orang (17%) menjawab kurang baik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata

masyarakat di sekitar Desa Simpang Kubu menganggap bahwa kedewasaan dan keluasan hubungan sosial Kepala Desa simpang kubu “cukup baik”.

Adapun alasan responden karena dalam menghadapi suatu masalah, Kepala Desa mampu menyelesaikan dengan baik. Itu mencerminkan bahwa Kepala Desa mempunyai emosi yang matang dan stabil. Selanjutnya Kepala Desa mampu melakukan interaksi dan bersosialisasi yang baik dengan masyarakat, baik itu dari masyarakat Desa Simpang Kubu maupun dari Desa lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Kubu, tanggal 23 November 2020 diperoleh informasi bahwa : *“Hubungan Kepala Desa dengan masyarakat harus terjalin dengan baik, hal ini untuk melakukan kerja sama yang optimal antara seorang pemimpin dengan bawahannya dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.”*

### **3. Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi**

Seorang pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal, efektif dan efisien.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang Indikator motivasi diri dan dorongan berprestasi pada Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Motivasi diri dan Dorongan Berprestasi pada Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kepala Desa Simpang Kubu memiliki motivasi diri yang tinggi	20	21	4	45
		44%	47%	9%	100%
2	Kepala Desa Simpang Kubu selalu memberikan dorongan berprestasi kepada masyarakat.	19	20	6	45
		42%	44%	13%	100%
Jumlah		39	41	10	90
Rata-rata		19	21	5	45
Persentase		42%	46%	11%	100%

Sumber :Data Olahan Lapangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator motivasi diri dan dorongan berprestasi Kepala Desa Simpang Kubu dimana 19 orang (42%) menjawab baik, 21 orang (46%) menjawab cukup baik, 5 orang (11%) menjawab kurang baik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata masyarakat di sekitar Desa Simpang Kubu menganggap bahwa motivasi diri dan dorongan berprestasi Kepala Desa simpang kubu “cukup baik”.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masyarakat desa Simpang Kubu banyak yang menyetujui bahwa Kepala Desa Simpang Kubu memiliki motivasi diri yang tinggi. Kepala Desa percaya bahwa ia dapat memajukan pembangunan di Desa Simpang Kubu, tentunya hal ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Kepala Desa dan masyarakat harus bekerjasama dalam memajukan pembangunan desa Simpang Kubu. hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa Simpang Kubu

memiliki motivasi diri yang tinggi. Kepala Desa mampu memberikan motivasi kepada masyarakat desa Simpang Kubu baik itu berupa moril ataupun materil dalam hal melakukan kegiatan untuk memajukan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Kubu, tanggal 23 November 2020 diperoleh informasi bahwa : *“Motivasi yang tinggi dari Kepala Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat turut serta berpartisipasi dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk menunjang pembangunan Desa Simpang Kubu.”*

#### 4. Sikap Hubungan Kemanusiaan

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang sikap hubungan kemanusiaan pada Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Sikap Hubungan Kemanusiaan pada Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kepala Desa Simpang Kubu selalu menolong masyarakat yang sedang kesusahan.	22	18	5	45
		49%	40%	11%	100%
2	Terjalin hubungan yang baik antara Kepala Desa Simpang Kubu dengan masyarakat.	20	17	8	45
		44%	38%	18%	100%
Jumlah		42	35	13	90
Rata-rata		19	18	7	45
Persentase		42%	39%	14%	100%

Sumber :Data Olahan Lapangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai indikator sikap hubungan kemanusiaan Kepala Desa Simpang Kubu dimana 19 orang (42%) menjawab baik, 18 orang (39%) menjawab cukup baik, 7 orang (14%) menjawab kurang baik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata masyarakat di sekitar Desa Simpang Kubu menganggap bahwa sikap hubungan kemanusiaan berprestasi Kepala Desa simpang kubu “cukup baik”.

Sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa harus bisa membawa masyarakat ke kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal itu dapat dilakukan Kepala Desa dengan memberikan suatu bimbingan ataupun menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Adanya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat akan menciptakan hubungan yang baik pula dan akan mempermudah melakukan kerjasama untuk memajukan Desa Simpang Kubu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Kubu, tanggal 23 November 2020 diperoleh informasi bahwa : *“Terjalannya hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat akan menimbulkan semangat partisipasi yang tinggi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai rasa ingin turut serta dalam memajukan Desa terutama dibidang pembangunan. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi. Mereka dapat berpartisipasi dengan materi (uang), tenaga, ide (buah fikiran) dan solidaritas yang tinggi kepada pemimpin maupun sesama masyarakat dalam hal kerja sama memajukan pembangunan Desa Simpang Kubu”*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini akan penulis sajikan rekapitulasi penelitian yang dilakukan tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

Tabel V.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecerdasan	14	25	6	45
		31%	56%	13%	100%
2	Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial	16	21	8	45
		36%	47%	18%	100%
3	Motivasi diri dan dorongan berprestasi	19	21	5	45
		42%	46%	11%	99%
4	Sikap hubungan kemanusiaan	19	19	7	45
		42%	42%	16%	100%
Jumlah		33	44	13	90
Rata-rata		19	22	7	45
Persentase		42%	49%	14%	100%

Berdasarkan tabel V.8 Rekapitulasi data diatas dapat diketahui tanggapan responden penelitian untuk 4 Indikator mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar). di jelaskan bahwa yang menyatakan kategori “ Baik” berjumlah 33 dan rata-rata responden 19 orang atau 42%. sedangkan yang menyatakan kategori “ Cukup Baik ” berjumlah 44 dan rata-rata responden 22 orang atau 49%. Kemudian yang menyatakan untuk kategori “Kurang Baik ” berjumlah 13 dan rata-rata responden 7 orang atau 14%.



Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui mengenai Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) di Kategorikan “ Cukup Baik ”dengan jumlah dengan persentase 42 %.

Potensi wilayah dapat dikembangkan bukan hanya keberadaan dan partisipasi masyarakatnya, namun juga dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah lokal mampu mengkondisikan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang peka terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. Tingkat sensitivitas pemimpin terhadap permasalahan dan kebutuhan lokal akan memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Dengan pembangunan ditingkat desa akan memberikan gambaran bahwa desa bukan merupakan daerah yang layak untuk diabaikan. Paradigma pembangunan sekarang ini sudah seharusnya berubah, pembangunan yang selama ini selalu difokuskan di perkotaan dan daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan, sekarang ini sudah harus di tinggalkan, karena masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal.

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki syarat-syarat yakni mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat, serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mungkin terombang ambingkan

oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang dapat memisahkan antara soal pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi. Mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dalam pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan.

Kepala Desa selaku koordinator pembangunan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di desanya mempunyai peranan yang krusial. Sebab dengan kepemimpinannya akan dirasakan sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan. Dalam pembangunan desa yang paling amat diperhatikan dan factor yang amat menentukan keberhasilan adalah bagaimana kepala desa dapat mengajak, mempengaruhi, membina dan memotivasi masyarakat desa tanpa partisipasi masyarakat tidak menyentuh sasaran pembangunan desa yang telah terprogram sebagai pembangunan nasional.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan usaha Kepala Desa Simpang Kubu dalam memberikan kesempatan dan mengembangkan motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dengan ajakan-ajakan persuasive dan komunikasi dengan kata-kata yang santun telah dilakukan oleh Kepala Desa. Namun dalam melaksanakannya kepala Desa belum dapat mengembangkan kreasi ide yang cemerlang sehingga masyarakat termotivasi terlibat langsung secara sukarela dalam pembangunan.

Kemampuan kepala desa Simpang Kubu untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas pembangunan secara sukarela amatlah perlu. Dengan usaha untuk

merangkul masyarakat merasa memiliki peran arti demi keberlangsungannya. Untuk itulah partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan dalam setiap kegiatan pembangunan maupun kemasyarakatan. Hal ini harus diupayakan oleh kepala desa agar setiap kegiatan yang dilaksanakan mendapat respon positif dari masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin formal harus mengetahui hal ini secara luas, sebab sebagai kegiatan yang dilakukan di desa akan selalu membutuhkan keikutsertaan dan dukungan dari masyarakat agar apa-apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di Desa Simpang Kubu ternyata figur kepala desa saat ini cukup ideal dimata masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa apa yang dicanangkanoleh pemerintahan desa bermanfaat langsung bagi seluruh warga. Permasalahan pembangunan yang sekarang ini bukan hanya merupakan tanggungjawab kepala desa akan tetapi tanggungjawab semua anggota masyarakat dan pemerintah. Kepemimpinan kepala desa sekarang ini menurut tokoh masyarakat dapat di jadikan tauladan bagi masyarakat karena cukup banyak program populis yang diselenggarakan dan mampu memperoleh dukungan dari masyarakat banyak diwilayah tersebut. Kondisi tersebut diakui sulit untuk dilakukan pada periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya.

Partisipasi masyarakat dewasa ini sangat sulit didapatkan akibat kesibukan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kesibukan masyarakat yang semakin beragam inilah yang mengakibatkan banyak program pembangunan jarang melibatkan masyarakat desa, mulai dari perencanaan, pengerjaan, dan evaluasi. Namun hal tersebut dapat diatasi pada masa

kepemimpinan desa saat ini. Teridentifikasi bahwa kesibukan individual pada masing-masing warga bukan faktor utama tidak jalannya program-program partisipatif pada kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Namun permasalahannya berada pada tidak jalannya komunikasi antara pemerintahan desa periode sebelumnya dengan masyarakat. Sehingga cukup banyak program yang pelaksanaannya, termasuklah perencanaan, proses, dan evaluasi yang tidak melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini merupakan sebuah keharusan. Pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut direncanakan. Jika perencanaannya matang, maka baru dapat dipertimbangkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi proses pembangunannya. Permasalahannya adalah, perencanaan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan tanggung jawab bersama. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa tidak secara otomatis disertai kemampuan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, keterlibatan aktif masyarakat pada program-program pembangunan yang berkaitan dengan hajat hidupnya sangatlah dibutuhkan.

Kepemimpinan bukan hanya menjalankan tugas pokok yang diamanahkan, melainkan harus mampu menjalankan peran layaknya orang yang diharapkan oleh masyarakat banyak, termasuklah pemenuhan kebutuhan semua anggota yang di pimpinnya. Kepala Desa Simpang Kubu sangat menyadari hal ini. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, apalagi dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat dianggap sebagai awal dari keberhasilan.

Membangun kerjasama dengan masyarakat tidak semudah apa yang di bayangkan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk melihat apa yang sedang dan apa yang akan dilakukan. Masih ada masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan pembangunan. Masyarakat ini hanya menerima apa yang berikan. Sedangkan masyarakat lainnya sangat peduli dengan kemajuan, sehingga partisipasi masyarakat tidak semua di dapatkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan berpengaruh terhadap apa yang sedang dikerjakan. Keberhasilan sebuah pembangunan bukan hanya tergantung dari berapa pandainya seorang pemimpin, akan tetapi juga bagaimana peran masyarakat di dalamnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data dan uraian yang telah dibahas pada akhir bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) Cukup Baik. adapun fakta dan data yang mendukung penulis didalam menarik kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Terbukti peran seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya sangat penting dalam hal apapun terutama dibidang pembangunan.
2. Pembangunan desa akan maju dan berkembang apabila adanya seorang pemimpin yang cerdas dan mempunyai wawasan yang luas, sehingga mampu mengeluarkan kebijakan yang baik.
3. Hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat harus terjaga. Sehingga akan terjadi hubungan kerja sama yang baik dalam memajukan Pembangunan Desa.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang perlu penulis kemukakan sesuai dengan hasil penelitian Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

1. Kepala Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

harus tegas dalam membuat kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, sehingga masyarakat lebih tegas dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat Kepala Desa.

2. Kepala Desa dapat merangkul semua komponen masyarakat didesanya, sehingga mereka dilibatkan dalam pembangunan desa dalam mengadakan keluasan hubungan social dan menerapkan sikap-sikap kemanusiaan yang baik.
3. Perlunya Kepala Desa melakukan koordinasi yang lebih baik lagi terhadap Aparatur Desa agar lebih membantunya dalam memecahkan persoalan pembangunan desa sehingga dapat memberikan masukan bagi Kepala Desa terhadap kekurangan mendapat inisiatif atau ide cemerlang, sehingga tidak menonton idea tau inisiatif dari Kepala Desa tersebut.
4. Kepala Desa Simpang Kubu perlu lebih menggerakkan, memotivasi dan meyakinkan masyarakat terhadap perlunya keterlibatan aktif dalam pembangunan melalui perbuatan yang terpuji, sehingga menunjukkan sikap ketauladanan dan melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat dengan banyak melakukan diskusi dan silaturahmi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Bratakusumah, DedySuoriady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama
- Edy Sutrisno, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam. Pranada Media Group, Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Edisi 6, Jakarta, 2013
- Mardikanto Totok. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Miftah Thoha.2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mikkelsen, Britha. 2011. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris*. Jakarta: PT Gramedia.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Dedy Mulyadi. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Rivai, Veithzal. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta raja Grafindo Persada
- Robbins, Stephen P. and Mary Coulter. 2012.*Management, Eleventh Edition*, (United States of America: Pearson Education Limited)
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.



- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor; Ghalia Indonesia
- Sutrisno, Edy. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama. Bandung
- Zulkarnain Nasution. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*. Malang: UMM Press.

### **Jurnal**

- Eka Aprita Rati. 2017. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyumas. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 4. No,1: 71-80.
- Dhani Akbar. 2017. Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 2 No.1: 135-150
- Rambu Hamu Eti. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Vol. 7. No. 3 : 148-152
- Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

### **Undang-undang**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah